

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan sering dijadikan acuan untuk menunjang keberhasilan dalam upaya penurunan angka kelahiran yang relatif cepat. Pada tahun 1970 pemerintah mempunyai keyakinan bahwa jumlah penduduk yang besar akan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang cepat. Oleh karena itu, penurunan angka kelahiran merupakan syarat bagi pertumbuhan ekonomi (Lembaga Demografi UI, 2010: 91). Secara nasional, pertumbuhan ekonomi harus bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Salah satu komponen yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk disuatu negara adalah fertilitas (kelahiran) yang bersifat menambah jumlah penduduk.

Indonesia negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar menduduki posisi keempat setelah China, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan data pada tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia mencapai 273 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,22%. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia mengalami lonjakan dengan angka yang dicapai sebesar 275.361.267 ribu jiwa.

Tujuan dari pembangunan suatu negara yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan permasalahan yang terjadi di setiap negara yaitu masalah kependudukan, karena penduduk merupakan obyek bagi pembangunan. Posisi penduduk yang dianggap sebagai obyek ini, mempunyai hak

untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau intensif dari pembangunan suatu Negara.

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh besarnya kelahiran (fertilitas), kematian dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh fertilitas diukur dengan jumlah anak lahir hidup dari seorang ibu. Fertilitas dalam pengertian demografi merupakan kemampuan riil seorang wanita untuk melahirkan. Fertilitas dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor yaitu demografi dan non demografi. Faktor demografi meliputi umur, umur perkawinan pertama, lama perkawinan, paritas atau jumlah persalinan yang pernah dialami dan proporsi perkawinan, sedangkan faktor non demografi meliputi keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi dan industrialisasi. (Rusli, 1996: 97).

Menurut teori Malthus dalam (Mantra, 2015: 51) keseimbangan pertumbuhan penduduk sangat diperlukan dikarenakan penambahan jumlah penduduk menurut deret ukur dan jumlah makanan atau sumber daya alam tumbuh berdasarkan deret hitung. Oleh sebab itu jumlah penduduk harus seimbang dengan lingkungan untuk menghindari beban ketergantungan dari meningkatnya jumlah penduduk, sehingga diperlukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Menurut Jhon S. Mill pada situasi tertentu penduduk dapat mempengaruhi demografi dan ketika penduduk memiliki produktivitas tinggi maka kecenderungan memiliki keluarga kecil lebih tinggi, dengan demikian tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masyarakat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri (Mantra, 2015: 53).

Fertilitas menjadi determinan faktor yang paling berpengaruh dibandingkan faktor lain terhadap laju pertumbuhan penduduk dalam kajian kependudukan, khususnya di negara-negara berkembang (Todaro dan Smith, 2009: 297). Cakupan kajian fertilitas yang begitu luas secara langsung maupun tidak langsung berhubungan erat dengan berbagai dimensi, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Adioetomo dkk, 2010).

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, dan upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2022, sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
2010	43.227.107
2011	43.938.796
2012	44.643.586
2013	45.340.799
2014	46.029.668
2015	44.643.586

2016	47.379.389
2017	48.037.827
2018	48.683.861
2019	49.316.712
2020	49.935.858
2021	48.782.402

*Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat*

Pertumbuhan penduduk di Jawa Barat cenderung naik. Jumlah penduduk Jawa Barat selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010 - 2020) bertambah 5,2 juta jiwa. Namun terus terjadi perlambatan LPP sejak Sensus Penduduk 1980. Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Jawa Barat sebanyak 48,27 juta jiwa, terdiri dari 24,51 juta orang penduduk laki-laki atau 50,77 persen dari penduduk Jawa Barat. Jumlah penduduk perempuan di Jawa Barat sebanyak 23,76 juta orang, atau 49,23 persen dari penduduk Jawa Barat. Rasio jenis kelamin penduduk Jawa Barat sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Jawa Barat pada tahun 2020.

Fertilitas merupakan salah satu aspek demografis yang dikaji dalam perkembangan dinamika kependudukan. Faktor ini merupakan komponen penting yang akan berpengaruh pada perubahan jumlah dan kualitas populasi pada satu negara (Maqvurah & Ratna, 2020). Fertilitas dapat dihitung dengan melihat Angka Lahir Hidup (ALH) yang merepresentasikan hasil reproduksi dari seseorang atau sekelompok ibu (Saleh, 2006). Berdasarkan kajian demografi, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi fertilitas, baik secara langsung maupun

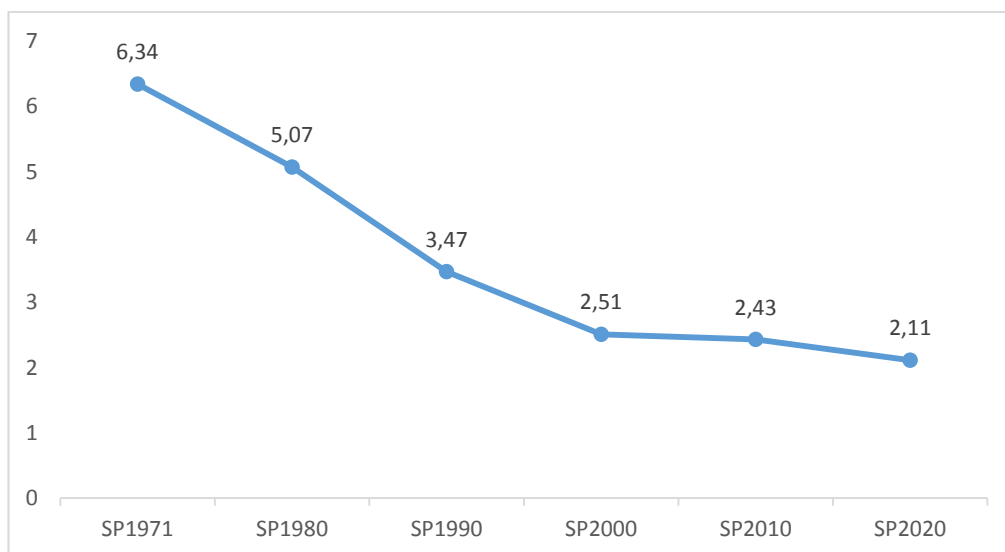
tidak langsung. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan pernyataan bahwa dasar pengambilan regulasi penekanan laju pertumbuhan penduduk adalah usia perkawinan pertama (BKKBN, 2014). BKKBN mengimplementasikan penundaan usia kawin melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Implikasi atau dampak dari pendewasaan usia perkawinan adalah menurunnya nilai Total Fertility Rate (TFR) (Ragayasa, 2017).

Dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat fertilitas, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi, sehingga pengukuran terhadap fertilitas ini dilakukan melalui dua macam pendekatan yaitu *Yearly Performance* dan *Reproductive History* yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa teknik penghitungan yang masing-masing memiliki kebaikan dan kelemahan. Salah satu teknik yang termasuk dalam pendekatan *Yearly Performance* adalah *Total Fertility Rate* (TFR) atau Angka Kelahiran Total. *Total Fertility Rate* (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap wanita. Kebaikan dari teknik ini adalah merupakan ukuran untuk seluruh wanita usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur, berbeda dengan teknik yang lain yang perhitungannya tidak memisahkan antara penduduk laki-laki dan perempuan serta tingkat usia produktif bagi wanita.

Sebagai salah satu ukuran yang merepresentasikan tingkat fertilitas angka kelahiran total (TFR) telah banyak diteliti terutama penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Becker (dalam Radifan, 2009) kuantitas anak pada suatu keluarga dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya membesarkan

anak, meningkatnya pendapatan akan membuat biaya untuk merawat dan membesarkan anak semakin mahal. Selain itu peningkatan pendidikan perempuan, partisipasi perempuan dalam pasar kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi angka kelahiran.

Menurut Population Reference Bureau (PRB) 2004, Total Fertility Rate (TFR) di negara maju sebesar 1,6 per 1000 kelahiran sedangkan TFR di negara berkembang sebesar 3.1 per 1000 kelahiran. Berdasarkan proyeksi TFR di beberapa negara pada periode 2015-2025 dari 16 negara yang diproyeksi, Indonesia merupakan negara dengan TFR tertinggi keenam yaitu sebesar 2,1 per 1000 kelahiran (Badan Pusat Statistik, 2018).



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

### **Gambar 1.1**

#### **Tren TFR Provinsi Jawa Barat SP 1971 – Long Form SP 2020**

Berdasarkan gambar 1.1 tingkat fertilitas Jawa Barat hasil Sensus Penduduk 1971 sampai Long Form SP2020 yang disajikan berdasarkan hasil estimasi

penghitungan TFR dengan metode Anak Kandung (*Own Children Method*). Fertilitas Jawa Barat menurun dalam lima dekade terakhir. Sensus Penduduk 1971 mencatat angka TFR sebesar 6,34 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 6-7 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP2020 mencatat TFR sebesar 2,11 yang berarti hanya sekitar dua sampai tiga anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil Long Form SP2020 semakin mendekati *Replacement Level* yang mana kondisi penduduk tumbuh seimbang.

Hal yang sama hasil pembaruan data (long form) Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Bali juga mengindikasikan jumlah kelahiran anak di Pulau Dewata cenderung menurun sejak tahun 1970-an. Berdasarkan hasil SP 1971, TFR di Bali sebesar 5,96 atau rata-rata lima sampai enam anak dilahirkan setiap perempuan usia subur. Sementara hasil long form SP 2020 menunjukkan TFR di Bali sebesar 2,04, atau rata-rata dua sampai tiga anak dilahirkan setiap perempuan usia subur. Tren penurunan ini membuktikan keluarga di Jawa Barat dan Bali telah menyiapkan dan merencanakan kelahiran anak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi rumah tangga.

Pembangunan ekonomi dapat diukur melalui pendapatan per kapita dan dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Easterlin dan Crimmins (1985) menyebutkan bahwa pengaturan fertilitas dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap anak dan biaya pengaturan fertilitas. Pada daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, akan terdapat lebih banyak penduduk yang dapat membiayai pengaturan fertilitas yang

akan menyebabkan lebih banyak masyarakatnya yang memiliki fertilitas lebih rendah. Selain itu, biaya pengaturan fertilitas juga dapat dilihat dari kemudahan akses untuk mendapatkan pengaturan fertilitas tersebut. Semakin sulit akses untuk mendapatkan pengaturan fertilitas, maka semakin banyak biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pengaturan fertilitas tersebut, sehingga akan semakin banyak orang yang tidak dapat membiayai pengaturan fertilitas tersebut.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa dalam kurun waktu empat tahun terakhir pada tahun 2017-2020. Perekonomian Jawa Barat pada TW I-2019 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 509,87 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 361,52 triliun. Pada TW I-2019 ekonomi tumbuh 5,43% Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia dan wilayahnya sebagian besar adalah daerah perkotaan metropolitan sehingga partisipasi perempuan dalam pasar kerja tinggi.

Pemerintah juga membuat regulasi terkait dengan pembatasan usia pernikahan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa pernikahan legal dilakukan jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun (Malinda, 2012; Republik Indonesia, 1974). Peraturan tersebut juga didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 (Republik Indonesia, 2009) terkait dengan batas usia melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual di bawah usia 20 tahun memiliki resiko terkena kanker serviks, penyakit menular seksual, kemungkinan



terjadi komplikasi kehamilan, dan persalinan dengan resiko kematian ibu yang juga akan berdampak pada kesehatan bayi, seperti berat badan lahir rendah (BBLR) (Muhadara et al., 2016).

Umur Kawin Pertama (UKP) menunjukkan dimulainya masa reproduksi perempuan (BPS, 2020). Menurut BPS (2020), semakin muda UKP maka semakin panjang masa reproduksi perempuan, sehingga berpengaruh pada jumlah anak yang dilahirkan. UKP dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait penekanan laju pertumbuhan penduduk.

Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik kependudukan yang unik dimana salah satunya adalah usia kawin pertama yang relatif masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa. Pada tahun 1996, wanita yang melangsungkan perkawinan pertamanya pada usia 10-16 tahun sebanyak 39% dan sedikit menurun menjadi 34,8% pada tahun 2000 (Hasbullah, M. Sairi dan Rudi Saprudin Dawris, 2001) dan sampai tahun 2020, usia perkawinan pertama wanita di Jawa Barat tetap rendah dimana usia perkawinan pertama wanita dibawah 16 tahun dengan persentase 11,48% dari seluruh provinsi di Indonesia (SUSENAS 2020).

Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai usia kawin pertama salah satunya oleh Gavin W. Jones (2008) yaitu mengenai fenomena usia perkawinan pertama di provinsi-provinsi di Indonesia. Secara umum, ia menyimpulkan bahwa usia perkawinan pertama di Indonesia masih tergolong rendah, walau secara keseluruhan fenomena usia perkawinan pertama bervariasi di semua provinsi. Faktor budaya menjadi salah satu faktor yang masih kuat

mempengaruhi terjadinya perkawinan muda (early marriage). Dengan kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi seharusnya dapat meningkatkan pendewasaan usia kawin. Pendewasaan usia kawin merupakan salah satu komponen vital yang turut menentukan kualitas sumber daya manusia dan kebahagiaan keluarga termasuk juga kesehatan ibu. Kondisi ini tentunya cukup memprihatinkan karena masih tingginya persentase wanita yang melangsungkan perkawinan pada usia sangat muda sehingga dapat menyebabkan resiko yang ditanggungnya akan lebih besar.

Upaya lain untuk menunda usia perkawinan adalah peningkatan pendidikan melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun. Hal ini akan berdampak pada pengurangan jumlah kejadian pernikahan dini. Selain itu, sosialisasi kesehatan reproduksi (Kespro) pada remaja, juga akan memberikan tambahan pengetahuan pada wanita tentang hak-hak reproduksinya (BKKBN, 2009, 2011).

Agar jumlah peningkatan penduduk di Jawa Barat tidak meningkat terlalu besar pada setiap tahunnya maka wanita di Jawa Barat harus memiliki pendidikan yang tinggi karena apabila tingkat pendidikannya itu semakin tinggi maka biasanya perempuan itu membuat perencanaan untuk memiliki anak lebih sedikit. (Bagoes, 2003) mengatakan saat tingkat pendidikan seorang perempuan semakin tinggi maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk bersekolah, akibatnya masa reproduktifnya pendek sehingga jumlah anak yang dimiliki berkurang, demikian sebaliknya. Menurut Todaro (2006) dalam Lestari dkk (2018), semakin tinggi tingkat pendidikan istri cenderung untuk merencanakan jumlah anak yang semakin sedikit. Seorang wanita dengan pendidikan tinggi cenderung lebih mengutamakan

pendidikan daripada memutuskan untuk menikah pada usia muda. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula umur kawin pertama pada perempuan (Febriyanti & Dewi, 2017).

Tingkat pendidikan wanita di Jawa Barat mayoritas hanya sampai tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini menunjukkan rendahnya pendidikan wanita di Jawa Barat. Jumlah generasi milenial di Jawa Barat hasil Sensus Penduduk 2020 mencapai 12,65 juta jiwa dan hampir separuhnya atau sekitar 49,23 persen adalah perempuan. Rata-rata lama sekolah perempuan milenial Jawa Barat hanya 10,11 tahun. Atau sama dengan taman SMP dan melanjutkan pendidikan SMA hanya sampai kelas 2. Di kelas dua, perempuan milenial ini diduga putus sekolah. Dari perempuan milenial itu, hanya 54,73 persen yang tamat SMP. Sementara perempuan milenial yang tamat SMA dan Perguruan Tinggi hanya sebesar 45,27 persen. Menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki walaupun mereka lahir sebagai generasi milenial. Kesenjangan ini juga terjadi antara perempuan milenial di perkotaan dan pedesaan. Di mana, perempuan dengan tingkat pendidikan SMP mayoritas ada di pedesaan.

Banyak faktor yang mempengaruhi upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran. Salah satunya adalah dari Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kaitannya dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur angka dan jarak kelahiran. Masalahnya adalah banyak PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, kondisi ini memiliki implikasi yang tinggi terhadap banyaknya PUS yang belum menjadi peserta KB (Suratun, 2008:5). Selain itu dilihat dari sisi status pemakaian kontrasepsi. Usia antara 15-64 tahun merupakan usia subur dan produktif bagi

seorang wanita karena pada rentang usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Salah satu cara untuk menekan laju penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Palmore dan Bulatao, dengan teori *Contrceptive Choice* (pemilihan alat kontrasepsi), berpendapat bahwa dengan menggunakan alat kontrasepsi dapat menjarangkan atau membatasi kelahiran (Suyonto,2006) yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan atau membatasi kehamilan. Bentuk dari alat kontrasepsi bermacam-macam dan kecocokan masyarakat. Adapun maksud dari penggunaan alat kontrasepsi adalah untuk mencegah kehamilan (Indan Entjang,1989: 81).

Data yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menunjukkan bahwa persentase penduduk wanita umur 15-49 tahun di Jawa Barat yang berstatus kawin dan sedang menggunakan alat kontrasepsi adalah sebesar 58.55% selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 57,14% mengalami sedikit penurunan namun pada tahun 2022 kembali naik menjadi 57,56% dari total seluruh penduduk perempuan yang berstatus kawin. Artinya semakin banyak persentase perempuan yang sedang menggunakan alat KB akan berdampak pada penurunan angka kelahiran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas di Jawa Barat. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Determinasi Fertilitas di Jawa Barat Pada Tahun 2010-2021**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita, jumlah perempuan yang sudah menikah , tingkat pendidikan perempuan, dan perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi secara parsial terhadap fertilitas di Jawa Barat tahun 2010-2021?
2. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita, jumlah perempuan yang sudah menikah , tingkat pendidikan perempuan, dan perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi secara bersama-sama terhadap fertilitas di Jawa Barat tahun 2010-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pengaruh PDRB perkapita, jumlah perempuan yang sudah menikah , tingkat pendidikan perempuan, dan perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi secara parsial terhadap fertilitas di Jawa Barat tahun 2010-2021.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh PDRB perkapita, jumlah perempuan yang sudah menikah , tingkat pendidikan perempuan, dan perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi secara bersama-sama terhadap fertilitas di Jawa Barat tahun 2010-2021.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan memperluas pengetahuan peneliti mengenai angka kelahiran dan analisis faktor-faktornya. Sehingga akan dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran apabila akan menginterpretasikannya di dunia nyata.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan lembaga-lembaga terkait tentang dengan fertilitas.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.



